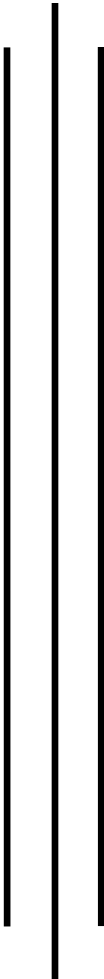


LAMPIRAN XXX : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN TAHUN 2027





**PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2026**

RENCANA KERJA

DINAS PERIKANAN KOTA BATAM TAHUN 2027



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2027.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dibidang dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2027.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2027 mempunyai nilai yang cukup strategis sebagai wujud nyata pembangunan di bidang Perikanan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari keterlibatan dan peran aktif dari semua pihak. Oleh karena itu kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja ini.

Semoga Rencana Kerja ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, 17 Juli 2026
Kepala Dinas Perikanan Kota Batam



Yudi Admajiarto, S. STP
NIP.19810929 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR GAMBAR.....iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I-1

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah I-1

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah I-1

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-2

1.2. Landasan Hukum I-3

1.3. Maksud dan Tujuan I-5

1.4. Sistematika Penulisan I-6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025..... II-1

2.2. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2025..... II-19

2.3. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027 II-21

2.4. Telaahan Pokok – pokok pikiran DPRD II-25

2.5. Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat II-37

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 III-1

3.2. Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra III-3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027 IV-1

4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Pencapaian Program Prioritas Daerah dan Nasional, Pencapaian SPM dan Tematik Lainnya IV-22

BAB V KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027.....V-1

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027.....V-1

BAB VI PENUTUP

6.1. Catatan Penting.....V-1

6.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....V-1

6.3. Rencana Tindak Lanjut.....V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian atas Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....II-1

Tabel 2.2 Capaian atas Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025.....II-1

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Batam.....II-3

Tabel 2.4 Penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Dalam Dokumen RKPD.....II-6

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan.....III-2

Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan.....III-3

Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.....IV-2

Tabel 4.2 Dukungan Program Dinas Perikanan Kota Batam Terhadap Prioritas
Nasional.....IV-22

Tabel 4.3 Dukungan Program Dinas Perikanan Kota Batam Terhadap Prioritas Kota
Batam.....IV-22

Tabel 4.4 Dukungan Program Dinas Perikanan Kota Batam Terhadap Prioritas
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027.....IV-23

Tabel 4.5 Dukungan Program Dinas Perikanan Kota Batam Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs).....IV-23

Tabel 4.6 Dukungan Program Dinas Perikanan Kota Batam Terhadap Optimalisasi
Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan.....IV-22

Tabel 5.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun
2027 dan Akhir Tahun 2030.....V-1

Tabel 5.2 Target Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun
2027 dan Akhir Tahun 2030.....V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RenjaI-2

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya.....I-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Renja Dinas Perikanan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Didalam Renja berisikan juga evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan pilihan, strategi, program kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

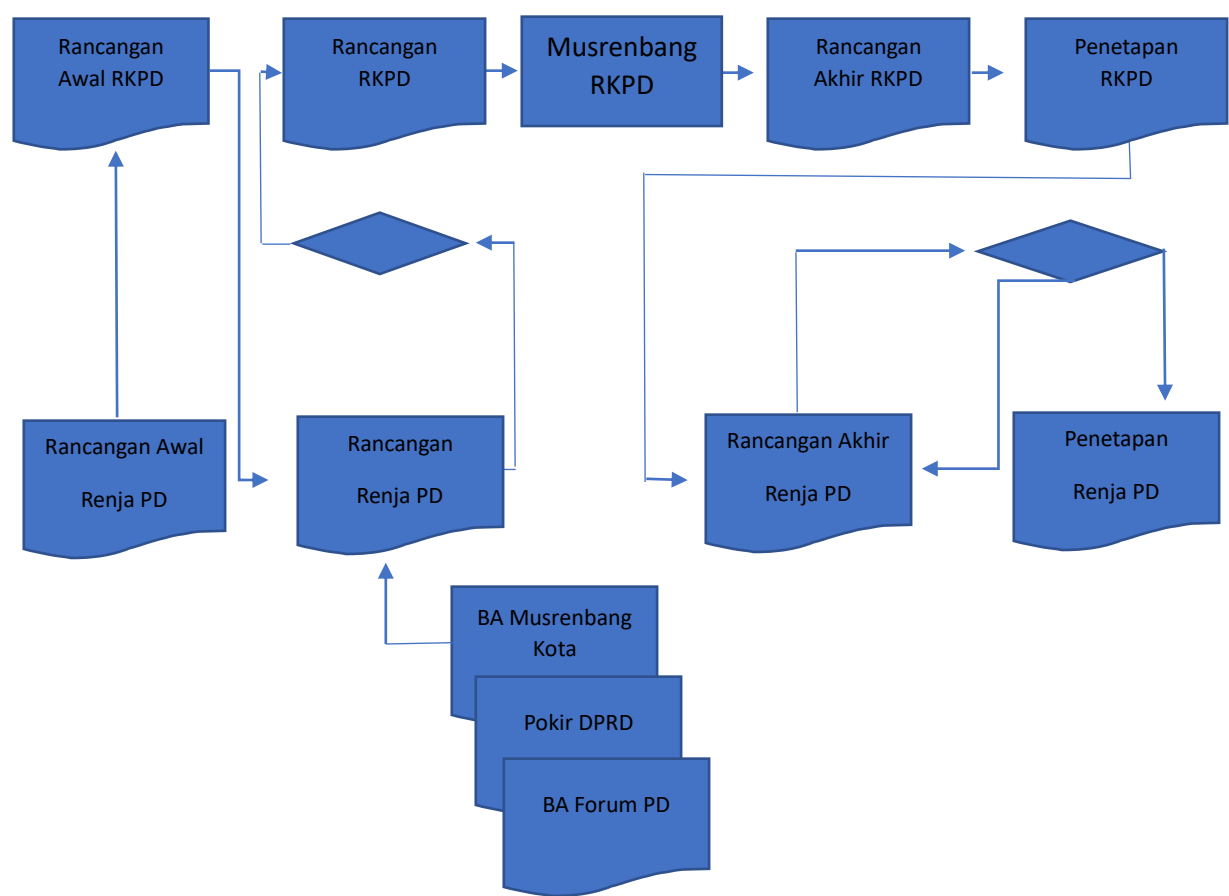
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. **Persiapan Penyusunan Renja**
- b. **Penyusunan Rancangan Awal Renja**
- c. **Penyusunan Rancangan Renja**
- d. **Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah**
- e. **Perumusan Rancangan Akhir Renja**
- f. **Penetapan Renja**

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja

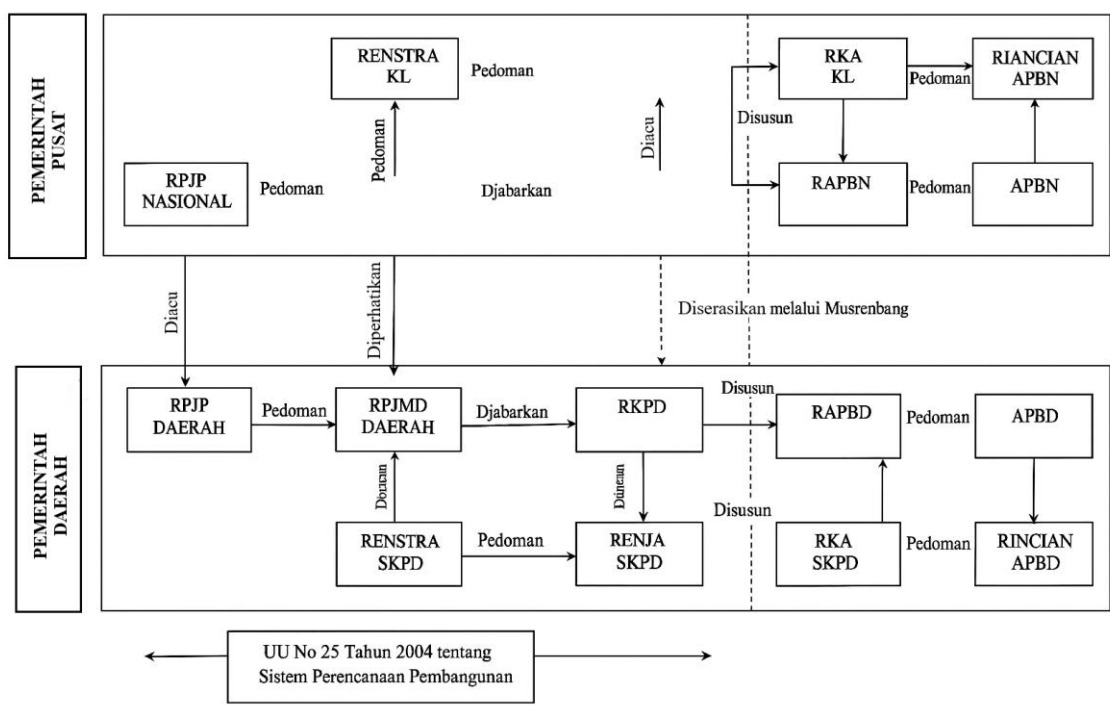


1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang selanjutnya Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2027 adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
- j. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
- k. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Akhir peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- q. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045;
- r. Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kota Batam No. 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041;
- t. Peraturan Daerah Kota Batam No. 04 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029;
- u. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Batam Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- v. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Perikanan;
- w. Peraturan Daerah Kota Batam No. 06 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025 - 2045.
- x. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Peraturan Wali Kota Batam No. 64 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.
- z. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang RKPD Tahun 2027;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2027, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Batam Tahun Anggaran 2027.

Tujuan di susunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Renja Dinas Perikanan Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

1) Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah. 2) Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum. 3) Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027. 4) Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

1) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029) disesuaikan dengan Lampiran Perwako RKPD Tahun 2027. 2) Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait), disesuaikan dengan Lampiran Perwako RKPD Tahun 2027. 3) Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis. 4) Telaah pokok-pokok pikiran DPRD, disesuaikan dengan Lampiran Perwako RKPD Tahun 2027 5) Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029), disesuaikan dengan Lampiran Perwako RKPD Tahun 2027 2) Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

1) Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan. 2) Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1) Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, (sesuai dengan lampiran Perwako RKPD Tahun 2027) 2)

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, (sesuai dengan lampiran Perwako RKPD Tahun 2027).

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (Capaian Tahun Pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)

Review hasil evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. IKU:

- a. Indikator Tujuan dalam Renstra Dinas Perikanan adalah Meningkatkan Pendapatan rata – rata nelayan kecil dan pembudidaya ikan ditargetkan Rp 52.277.916 dengan realisasi mencapai Rp 47.696.647 atau dengan capaian sebesar 91,24%
- b. Jumlah Produksi Perikanan Ditargetkan sebesar 35.402 dengan realisasi mencapai 37.511 atau dengan capaian sebesar 105,9%.
- c. Jumlah Angka Konsumsi Ikan Ditargetkan sebesar 33,33 dengan realisasi mencapai 40,60 atau dengan capaian sebesar 121,81%.
- d. Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Ditargetkan sebesar 91,00 dengan realisasi mencapai 91 atau dengan capaian sebesar 100%.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan berhasil melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh faktor distribusi bantuan dan penyuluhan yang tepat sasaran serta optimalisasi pembinaan nelayan dan pembudidaya ikan.

2. IKK:

- a. Produksi Perikanan Tangkap Ditargetkan sebesar 25.787,71 dengan realisasi mencapai 26.366,37 atau dengan capaian sebesar 102,24%.
- b. Produksi Perikanan Budidaya Ditargetkan sebesar 9.614,28 dengan realisasi mencapai 11.144,84 atau dengan capaian sebesar 115,91%.

Tabel 2.1 Capaian atas Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
1	Pendapatan rata rata nelayan kecil dan pembudidaya ikan dalam satu tahun	(Rp)	48.525.300	52.277.916	47.696.647	91,20	ST	71.400.804
1.1	Jumlah produksi perikanan	(ton)	35.287,88	35.402	37.511,21	106	ST	36.839,46
1.2	Angka konsumsi ikan	(kg/orang/tahun)	33,26	33,33	40,60	121,81	ST	33,59
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	(IKM)	90,75	91,00	91	100	ST	93,00

Tabel 2.2 Capaian atas Target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
3	Urusan Pilihan							
a	Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	25.532,39	25.787,71	26.366,37	102,24	ST	26.834,80
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	10.055,49	9.614,28	11.144,84	115,92	ST	10.004,66

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) hanya ditetapkan untuk urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Oleh karena itu, pada urusan perikanan, Perangkat Daerah terkait tidak terdapat SPM. Kewenangan bidang kelautan dan perikanan masuk dalam kategori urusan pemerintahan wajib *bukan* pelayanan dasar, sehingga tidak memiliki target capaian SPM khusus.

2.3. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

2.3.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - a. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah. Hingga Triwulan 4 Realisasi Fisik 0% hal ini dikarenakan Spesifikasi tidak tersedia dipasaran.
2. Realisasi program/kegiatan selain kegiatan tersebut di atas telah memenuhi target kinerja pada kisaran 75 – 100 %.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Batam sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Batam

PD : Dinas Perikanan Kota Batam

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3.	Urusan Pilihan									
3.25	Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan									
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP PD	71.34	-	71.34	71.34	-	73,97	73,97	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	93	-	-	-	-	94	94	100%
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	-	-	-	-	-	86	86	-
3.25.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-	-	-	-	7	7	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3.25.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	-	-	-	-	5	5	-
3.25.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	-	-	-	-	3	3	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3.25.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-	-	-	-	24	24	-
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 25 01 2.02 0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	-	95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	100%	95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	100%
3.25.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		Pelaksanaan Tugas ASN								
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	-	-	-	-	-	100 %	100 %	-
3.25.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapan	0 Paket	-	-	-	-	95 paket	95 paket	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3.25.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	-	-	-	-	0 Orang	0 Orang	0%
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	-	100%	93,79%	-	100%	100%	100%
3.25.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	83,33%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3.25.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	-	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	83,33%
3.25.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	-	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	83,33%
3.25.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	-	100%	94,20%	94,20%	100%	100%	100%
3.25.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	-	1 Unit	0 Unit	0%
3.25.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	56 Unit	-	56 Unit	56 Unit	100%	56 paket	56 paket	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3.25.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54 Unit	-	54 Unit	52 Unit	96,30%	54 Unit	54 Unit	100%
3.25.01.2.07.0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	-	6 Unit	0 Unit	0 %	-	-	-
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3.25.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
3.25.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	-	100%	99,91%	99,91%	100%	100%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
3.25.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	-	11 unit	11 unit	100%	11 unit	11 unit	100%
3.25.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	37 unit	-	37 unit	36 unit	97,3%	37 unit	37 unit	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3.25.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Nelayan Kecil	25.787,71 Ton	-	25.787,71 Ton	44.138,67 Ton	171 %	26.045,59	26.045,59	100%
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya	5.807 RTP	-	5.807 RTP	5.807 RTP	100%	6823 RTP	6823 RTP	100%
3.25.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya	-	-	-	-	-	0 Orang	0 Orang	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3.25.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	60 Kelompok					70 kelompok	70 Kelompok	100%
3.25.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	5.000 Unit Usaha	-	5.000 Unit Usaha	5.000 Unit Usaha	100%	6.000 Unit Usaha	6.000 Unit Usaha	100%
3.25.03.2.02.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan	641 Unit	-	462 Unit	462 Unit	72,07%	335 Unit	335 Unit	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =5+7+9	11 = 10/4
		Usaha Nelayan Skala Kecil								
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi pembudidaya ikan	9.614,28 Ton	-	9.614,28 Ton	11.144,84 Ton	115%	9.710,43	9.710,43	100%
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat status kelasnya	20 RTP	-	20 RTP	20 RTP	100%	23 RTP	23 RTP	100%
3.25.04.2.02.0001	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 kelompok	-	-	-	-	20 Kelompok	20 Kelompok	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi SOP	330 RTP	-	330 RTP	982 RTP	297%	530 RTP	530 RTP	100%
3.25.04.2.04.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4 dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	0%
3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu)	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		Daerah Kabupaten/Kota								
3.25.04.2.04.0009	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	381 Unit	-	-	-	-	233 Unit	233 Unit	100%
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	1.465,29 Ton	-	1.465,29 Ton	1.467,16 Ton	100,12 %	1.479,94	1.479,94	100%
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala	100 Unit Usaha	-	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100%	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
	Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	kecil dan mikro yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan								
3.25.06.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	100 Unit Usaha	-	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100%	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
		Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko								
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan	44.195,58 (Ton)	-	44.195,58 (Ton)	45.408,75 (Ton)	102%	45.160,64 (Ton)	45.160,64 (Ton)	100%
3.25.06.2.03.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	945 Ton	-	-	-	-	965 Ton	965 Ton	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2029	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3.25.06.2.03.0002	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	88 Pelaku Usaha	-	-	-	-	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	

2.3.2 Permasalahan

Dinas Perikanan Kota Batam merupakan salah satu Perangkat Daerah PD di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang mempunyai tugas dan fungsi pada sektor perikanan. Kebijakan dan strategi di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pengolahan hasil perikanan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan protein ikan di Kota Batam dan Propinsi Kepulauan Riau pada umumnya. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Batam, maka dipetakan permasalahan sebagai berikut.

Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan.	1. Belum optimalnya produksi nelayan kecil	1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap. 2. Masih rendahnya kapasitas nelayan kecil. 3. Masih lemahnya kelembagaan nelayan kecil. 4. Masih rendahnya kemitraan dengan pemangku kepentingan yang lain.
		2. Belum optimalnya pembudidaya ikan.	1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya. 2. Masih rendahnya kapasitas pembudidaya ikan. 3. Masih lemahnya kelembagaan pembudidaya ikan. 4. Masih rendahnya kemitraan dengan pemangku kepentingan yang lain.
		3. Belum optimalnya daya saing pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.	1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran perikanan. 2. Masih rendahnya kapasitas pengolah hasil perikanan. 3. Masih lemahnya kelembagaan pengolah dan pemasar hasil perikanan. 4. Masih rendahnya kemitraan dengan pemangku kepentingan yang lain.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			5. Belum optimalnya sosialisasi dan promosi konsumsi ikan.
		4. Belum optimalnya pelayanan sekretariat	1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesekretariatan. 2. Belum optimalnya kapasitas SDM dinas Perikanan.

2.3.3 Kondisi Lingkungan Dinamis

- Untuk pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kota Batam terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi yaitu:
1. Kualitas sumberdaya manusia nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan yang masih perlu ditingkatkan;
 2. Sarana perikanan tangkap, sarana perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan yang masih perlu ditingkatkan;
 3. kemudahan akses permodalan kepada nelayan kecil, pembudidaya ikan serta pengolah hasil perikanan yang masih perlu ditingkatkan;
 4. Kelembagan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan yng masih perlu dikuatkan.

- Di samping hambatan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Dinas Perikanan Kota Batam yaitu:
1. Dukungan yang kuat dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 2. Letak Batam yang strategis yang dekat dengan negara tetangga terutama Singapura sehingga mempermudah pemasaran produk perikanan Kota Batam;
 3. Keinginan kuat yang dimiliki nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolahah hasil perikanan untuk maju.
 4. Penyederhanaan Birokrasi

- Dengan terbitnya PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, birokrasi menjadi lebih dinamis, terwujudnya profesionalitas ASN, focus pada pekerjaan fungsional, percepatan system kerja, pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Berkembangnya inovasi dan teknologi di sektor perikanan.

Dengan adanya inovasi dan teknologi dibidang perikanan terutama perikanan budidaya dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas

produksi perikanan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat perikanan.

2.3.4 Isu - Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah Kementerian Kelautan dan Perikanan, sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, implikasi RTRW dan KSLH Kota Batam ditetapkan isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Batam sebagaimana tabel berikut.

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Produksi Nelayan Kecil	Berkurangnya wilayah penangkapan ikan nelayan kecil	Penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang mengakibatkan daerah pesisir di Pulau Rempang berpotensi tidak bisa dimanfaatkan nelayan kecil sebagai area penangkapan ikan (catchment area)
		Sarana dan prasarana perikanan tangkap belum mampu mendukung peningkatan produksi secara optimal	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
		Tingkat penguasaan teknologi nelayan masih rendah	Peningkatan Sumber Daya Manusia Nelayan.

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
2	Produksi pembudidaya ikan	Berkurangnya wilayah pembudidaya ikan.	Penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang mengakibatkan kolam dan tambak di Pulau Rempang berpotensi ditutup karena akan dijadikan Kawasan industri dan pariwisata.
		Sarana dan prasarana budidaya belum mampu mendukung peningkatan produksi secara optimal	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya.
		Lahan yang tersedia untuk perikanan budidaya di dalam RTRW masih terbatas dan teralokasi di tempat yang jauh dari pembudidaya ikan.	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya.
		Tingkat penguasaan teknologi pembudidaya ikan masih rendah	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pembudidaya Ikan
3	Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan.	Sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan belum mampu mendukung peningkatan produksi secara optimal	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan
		Tingkat penguasaan teknologi pengolah hasil perikanan masih rendah	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan

Isu strategis yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan yang berkelanjutan di Kota Batam meliputi:

1. Penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Ecocity di Pulau Rempang.

Penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang mengakibatkan daerah pesisir di Pulau Rempang berpotensi tidak bisa dimanfaatkan nelayan kecil sebagai area penangkapan ikan (catchment area). Untuk mengantisipasi hal tersebut nelayan terdampak PSN tersebut perlu diberikan bantuan berupa sarana perikanan tangkap yang dapat menjangkau area tangkapan yang lebih baik yang iasanya memiliki jarak yang lebih jauh.

Selain itu PSN tersebut juga berdampak kepada perikanan budidaya. Kolam dan tambak di Pulau Rempang berpotensi ditutup karena akan dijadikan Kawasan industri dan pariwisata. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pembudidaya ikan terdampak PSN perlu diberikan bantuan berupa sarana bioflok yang mengandalkan system resirkulasi.

2. Terbitnya Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2025 yang mengatur perubahan atas PP 41/2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, terutama soal kewenangan di KEK serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dengan terbitnya kedua Peraturan pemerintah tersebut berkemungkinan tugas yang diemban Dinas Perikanan Kota Batam akan bertambah jika Badan Pengusahaan Batam mendelegasikan

2.4 Telaah Pokok – pokok Pikiran DPRD

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal bottom up yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan top down dari kunjungan wali kota dan reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana Penjaringan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Dinas Perikanan Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Perikanan Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan prioritas yang dapat diakomodir oleh Dinas Perikanan Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun Tabel hasil kanjian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penelaahan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Dalam Dokumen RKPD

Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

No	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	OPD Tujuan Akhir
1.	Muhammad Kamaludin, S.Pd.I	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan budidaya	Pengadaan Bioflog (Kelompok Nelayan Kecamatan Sungai Beduk dan Nongsa)	Kelompok Nelayan Kecamatan Sungai Beduk dan Nongsa, Kota Batam	Verifikasi TAPD	20	Paket	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	DINAS PERIKANAN
2.	Muhammad Kamaludin, S.Pd.I	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Pengadaan mesin tempel tangkap ikan 4PK (KUB Nelayan Kecamatan Nongsa)	KUB Nelayan Kecamatan Nongsa, Kota Batam	Verifikasi TAPD	10	Unit	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN
3.	Ruslan Sinaga	Pengadaan Sarana Prasarana	Pakan Ikan Air Tawar - Pokdakan Sitinur Jaya	Batam (Pokdakan Sitinur Jaya), Kota Batam	Verifikasi TAPD	1000	Kg	P1. Pengentasan kemiskinan dan	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	DINAS PERIKANAN

No	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	OPD Tujuan Akhir
		Perikanan budidaya						perlindungan sosial adaptif generatif		
4.	M. Putra Pratama Jaya	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	PENGADAAN ALAT TANGKAP NELAYAN KAWAT BUBU , BUBU BENTO MESIN 15 PK SEKECAMATAN BULANG, GALANG, SEI BEDUK, DAN NONGSA	SEKECAMATAN BULANG, GALANG, SEI BEDUK, DAN NONGSA , Kota Batam	Verifikasi TAPD	2	Paket	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN
5.	Kamaruddin , S.E	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	PENGADAAN MESIN TEMPEL SEKECAMATAN BENGKONG	SEKECAMATAN BENGKONG, Kota Batam	Verifikasi TAPD	5	Unit	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN

No	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	OPD Tujuan Akhir
6.	Hj.Asnawati Atiq, SE., M.M	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	PROGRAM ALAT TANGKAP NELAYAN MESIN 40 PK SEKECAMATAN BATU AMPAR	SEKECAMATAN BATU AMPAR, Kota Batam	Verifikasi TAPD	10	Unit	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN
7.	Budi Mardiyanto, SE	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan budidaya	Bantuan Perlengkapan Budidaya Ikan Sistem Bioflok Kavling Mentarau RT.04 RW.12 No.01 Kel.Patam Lestari RT.04 RW.12 No.01 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang	Kavling Mentarau RT.04 RW.12 No.01 Kel.Patam Lestari Kec.Sekupang, Kota Batam, Kota Batam	Verifikasi TAPD	16	Set	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	DINAS PERIKANAN
8.	Warya Burhanuddin, A.Md	Pengadaan Sarana Prasarana	Pengadaan Dan Budidaya Ikan Bioplok	Kecamatan Batu Aji , Kota Batam	Verifikasi TAPD	5	Set	P1. Pengentasan kemiskinan	Program Pengelolaan	DINAS PERIKANAN

No	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	OPD Tujuan Akhir
		Perikanan budidaya						dan perlindungan sosial adaptif generatif	Perikanan Budi Daya	
9.	H. Hary Herlangga, S.T, M.Ak	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	PENGADAAN MESIN 15 PK KEC BULANG, SEI BEDUK & GALANG	KEC BULANG, NONGSA, SEI BEDUK & GALANG, Kota Batam	Verifikasi TAPD	10	Unit	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN
10.	Muhammad Yunus Muda, S.E	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	PENGADAAN BOAT DAN MESIN SEKECAMATAN BENGKONG DAN BATU AMPAR KOTA BATAM	SEKECAMATAN BENGKONG DAN BATU AMPAR KOTA BATAM, Kota Batam	Verifikasi TAPD	2	Set	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN

No	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	OPD Tujuan Akhir
11.	Muhammad Yunus Muda, S.E	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan budidaya	PENGADAAN BIBIT IKAN KAKAP SE KOTA BATAM	SE KOTA BATAM, Kota Batam	Verifikasi TAPD	5.000	Bibit	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	DINAS PERIKANAN
12.	Amirsyah, S.T	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Alata Tangkap Ikan (Mesin)	Kecamatan Sagulung, Kota Batam	Verifikasi TAPD	1	unit	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN
13.	Muhamad Yunus, S.Pi	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Pengadaaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap (Boat Fiber 21 Kaki,	Kecamatan Nongsa, Kota Batam	Verifikasi TAPD	5	Unit	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN

No	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	OPD Tujuan Akhir
			Mesin 15 PK dan Mesin 4 PK)							
14.	Muhamad Yunus, S.Pi	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan budidaya	Pengadaan Bioflok	Batu Besar, Kota Batam	Verifikasi TAPD	5	Paket	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	DINAS PERIKANAN
15.	Muhammad Kamaludin, S.Pd.I	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan budidaya	Pengadaan bibit dan pakan Ikan Kerapu Cantang Kelompok Nelayan Dapil III Kecamatan Nongsa, Sungai Beduk, Bulang, dan Galang	Kelompok Nelayan Dapil III Kecamatan Nongsa, Sungai Beduk, Bulang, dan Galang, Kota Batam	Verifikasi TAPD	10.000	Ekor	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	DINAS PERIKANAN

No	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	OPD Tujuan Akhir
16.	Muhammad Kamaludin, S.Pd.I	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Pengadaan mesin tempel tangkap ikan 15PK KUB Nelayan Kecamatan Nongsa, Bulang	KUB Nelayan Kecamatan Nongsa, Bulang , Kota Batam	Verifikasi TAPD	21	Unit	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN
17.	Muhammad Kamaludin, S.Pd.I	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Pengadaan kawat 18 bubuh ikan karang KUB Nelayan Kecamatan Nongsa	KUB Nelayan Kecamatan Nongsa, Kota Batam	Verifikasi TAPD	180	Gulung	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN
18.	Siti Nurlailah, ST., MT	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan budidaya	Bioflok di Kecamatan Batu Ampar dan Bengkong	Kecamatan Batu Ampar dan Bengkong, Kota Batam	Verifikasi TAPD	8	Set	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	DINAS PERIKANAN

No	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	OPD Tujuan Akhir
19.	Sulaiman	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Boat 15 PK	Kecamatan Belakang Padang , Kota Batam	Verifikasi TAPD	12	Unit	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN
20.	Sulaiman	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Boat 40 PK	Kecamatan Belakang Padang , Kota Batam	Verifikasi TAPD	4	Unit	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN
21.	H. Aweng Kurniawan	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin 15 PK (Yamaha), Se Kecamatan Sekupang dan Kecamatan	Kecamatan Sekupang, dan Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam	Verifikasi TAPD	70	Unit	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN

No	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	OPD Tujuan Akhir
			Belakang Padang.							
22.	Budi Mardiyanto, SE	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Mesin untuk warga di Kecamatan Belakang Padang Mesin 40 PK dan 15 PK	Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam	Verifikasi TAPD	5	buah	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN
23.	Muhammad Mustofa, SH, MH	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan budidaya	PENGADAAN BIBIT IKAN DAN BIOFLOK	KELOMPOK NELAYAN SUNGAI BEDUK , Kota Batam	Verifikasi TAPD	4	paket	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	DINAS PERIKANAN

No	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	OPD Tujuan Akhir
24.	Setia Putra Tarigan	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Pengadaan Sarana Tangkap ikan Mesin Kapal / boat 15PK Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kelurahan. Sadai, Kecamatan Bengkong.	Kelurahan. Sadai, Kecamatan Bengkong. Kota Batam	Verifikasi TAPD	8	Set	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN
25.	Setia Putra Tarigan	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Pengadaan Sarana Tangkap ikan Kapal/Boat dan Mesin 15PK Kelurahan Tanjung Buntung	Kelurahan Tanjung Buntung Kecamatan. Bengkong. Kota Batam	Verifikasi TAPD	4	Set	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN

No	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	OPD Tujuan Akhir
			Kecamatan. Bengkong.							
26.	Setia Putra Tarigan	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Pengadaan Sarana Tangkap ikan Kapal/Boat dan Mesin 15PK Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong	Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong , Kota Batam	Verifikasi TAPD	8	Unit	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN
27.	Sulaiman	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Ting Ting UNTUK KELOMPOK NELAYAN	SE Kecamatan Belakang Padang , Kota Batam	Verifikasi TAPD	50	Unit	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN
28.	Muhammad Syafei, S.T	Pengadaan Sarana Prasarana	PENGADAAN SARANA PRASARANA	KECAMATAN SAGULUNG ,	Verifikasi TAPD	8	Set	P1. Pengentasan kemiskinan	Program Pengelolaan	DINAS PERIKANAN

No	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	OPD Tujuan Akhir
		Perikanan budidaya	PERIKANAN BUDI DAYA (BIBIT IKAN, BIOFLOK, PAKAN IKAN)	Kota Batam , Kota Batam				dan perlindungan sosial adaptif generatif	Perikanan Budi Daya	
29.	M. Putra Pratama Jaya	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan budidaya	PENGADAAN BIBIT KERAPU CANTANG SE KOTA BATAM	SE KOTA BATAM, Kota Batam	Verifikasi TAPD	10.000	Ekor	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	DINAS PERIKANAN
30.	Sulaiman	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan budidaya	BIOFLOG	KECAMATAN SEKUPANG, Kota Batam	Verifikasi TAPD	8	Set	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	DINAS PERIKANAN

No	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	OPD Tujuan Akhir
31.	Anwar Anas	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan budidaya	Pengadaan Bioflog Kecamatan Sei Beduk	Kecamatan Sei Beduk , Kota Batam	Verifikasi TAPD	40	Set	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	DINAS PERIKANAN
32.	Amirsyah, S.T	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan budidaya	Bioflog. Sekecamatan Sagulung	Sekecamatan Sagulung , Kota Batam	Verifikasi TAPD	10	Set	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	DINAS PERIKANAN
33.	Muhamad Yunus, S.Pi	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	Kecamatan Nongsa, Kota Batam	Verifikasi TAPD	565	Paket	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN

No	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	OPD Tujuan Akhir
34.	H. Djoko Mulyono, SH., MH	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan budidaya	PENGADAAN PANGAN IKAN NILA SEKECAMATAN SAGULUNG	SEKECAMATAN SAGULUNG , Kota Batam	Verifikasi TAPD	1.000	Kg	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	DINAS PERIKANAN
35.	H. Djoko Mulyono, SH., MH	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan budidaya	PENGADAAN BIOFLOK PERUM BUANA RAYA KEL. SEI LANGKAI KEC. SAGULUNG	PERUM BUANA RAYA KEL. SEI LANGKAI KEC. SAGULUNG, Kota Batam	Verifikasi TAPD	6	Set	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	DINAS PERIKANAN
36.	Amirsyah, S.T	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan budidaya	Pengadaan Bibit Ikan Laut. Sekecamatan Sagulung	Sekecamatan Sagulung, Kota Batamv	Verifikasi TAPD	5.000	Ekor	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	DINAS PERIKANAN

No	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	OPD Tujuan Akhir
37.	Amirsyah, S.T	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan budidaya	Pengadaan Bibit Ikan Tawar. Sekecamatan Sagulung	Sekecamatan Sagulung, Kota Batam	Verifikasi TAPD	25.000	Ekor	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif generatif	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	DINAS PERIKANAN

2.5 Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dinas Perikanan Kota Batam memiliki inovasi utama bernama PONJEN (Pola Jitu Pemberdayaan Nelayan). Langkah awal ini mengoptimalkan potensi perikanan tangkap melalui pengorganisasian yang lebih rapi dan terarah bagi ribuan rumah tangga perikanan.

Seiring berjalannya waktu, implementasi Ponjen memperkuat kapasitas nelayan dalam mengelola sarana penangkapan ikan secara mandiri dan berkelanjutan. Kelompok nelayan kini lebih mudah mendapatkan akses pembinaan, distribusi hasil tangkapan yang efektif, serta penerapan teknologi penangkapan yang ramah lingkungan demi menjaga ekosistem laut.

Dampak positif utama dari inovasi ini terlihat pada meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir secara nyata. Pendapatan nelayan menjadi lebih stabil, daya saing produk perikanan meningkat, dan tercipta kebersamaan yang kokoh di antara para pelaku usaha perikanan kota batam.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025-2029. Adapun tujuan dari dinas Perikanan Kota Batam adalah Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan pembudidaya ikan.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 -2029 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Produksi Perikanan
- 2. Meningkatnya daya saing produk perikanan
- 3. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2027 mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan
Kota Batam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2027
1	Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan pembudidaya ikan		Pendapatan rata-rata nelayan kecil dan pembudidaya ikan (dalam satu tahun) (Rp)	61.661.316,-
		1. Meningkatnya produksi perikanan	jumlah produksi perikanan (ton)	36.113,58
		2. Meningkatnya daya saing produk perikanan	Angka Konsumsi Ikan (kg/orang/tahun)	33,46
		3. Meningkatnya eifisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92

3.2 Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan Dengan Renstra

Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kota Batam arah kebijakan dibuat untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, melalui arah kebijakan dapat dijelaskan secara sistematis dan tetap menjadi rujukan dalam setiap jalannya kegiatan pemerintahan selama 5 tahun. Analisis arah kebijakan Dinas Perikanan Kota Batam disajikan pada gambar dan tabel di bawah ini.

Visi : Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya, dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata
Misi Ke-3 : Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia
Tujuan Ke-3 : Menciptakan kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan generasi yang unggul
Sasaran Ke-1 : Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kota Batam

No (1)	Tujuan Dinas (2)	Sasaran Dinas (3)	Strategi Dinas (4)	Arah Kebijakan Dinas (5)
1	Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan pembudidaya ikan	1.1 Meningkatkan produksi perikanan	1.1.1 Mengoptimalkan Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.1.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap
				1.1.1.2 Pengembangan kapasitas nelayan kecil
				1.1.1.3 Penguatan kelembagaan Nelayan Kecil
				1.1.1.4 Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha bagi nelayan kecil
				1.1.1.5 Penyediaan data perikanan tangkap yang akurat dan sistematis
			1.1.2 Mengoptimalkan Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.1.2.1 Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya
				1.1.2.2 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
				1.1.2.3 Penyediaan data perikanan budidaya yang akurat dan sistematis
				1.1.2.4 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan
				1.1.2.5 Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil

No (1)	Tujuan Dinas (2)	Sasaran Dinas (3)		Strategi Dinas (4)		Arah Kebijakan Dinas (5)	
						1.1.2.6	Penguatan kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil
		1.2	Meningkatnya daya saing produk perikanan	1.2.1	Mengoptimalkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.2.1.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan
						1.2.1.2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha olahan hasil Perikanan Skala Mikro
						1.2.1.3	Pelaksanaan Bimbingan dan Pengawasan Mutu pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil
						1.2.1.4	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
						1.2.1.5	Promosi dan sosialisasi produk perikanan
		1.3	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan	1.3.1	Mengoptimalkan pelayanan pemerintahan	1.3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						1.3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						1.3.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						1.3.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
						1.3.1.5	Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						1.3.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						1.3.1.7	Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2027

Dinas Perikanan Kota Batam pada perencanaan tahun 2027 merupakan tahun ke-Tiga dalam Renstra Tahun 2025-2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Dinas Perikanan Kota Batam untuk Tahun 2027 melaksanakan 4 (Empat) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan, 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2027

2026-07-22

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				29.484.369.799							31.360.974.910			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				29.484.369.799							31.360.974.910			
					DINAS PERIKANAN				29.484.369.799							31.360.974.910			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN D A E R A H K A B U P A T E N / K O T A	Nilai SAKIP PD	78.97	74.97 Nilai	17.154.711.115							76.97	20.714.305.952	Dinas Perikanan	
						Indeks Layanan Keseekretariatan PD	97	95 Nilai								96		Dinas Perikanan	
3	25	01	2.01		P e r e n c a n a a n , P e n g a n g g a r a n , d a n E v a l u a s i K i n e r j a P e r a n g k a t D a e r a h	Persentase dokumen p e r e n c a n a a n , p e n g a n g g a r a n , d a n e v a l u a s i y a n g t e r s u s u n s e s u a i d e n g a n t a h a p a n d a n w a k t u		8 7 Persentase	1.917.600							88	10.000.000	Dinas Perikanan	
3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	815.000	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	7	3.000.000	Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5 Dokumen	143.800	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota B a t a m 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	5	2.000.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3 Dokumen	143.800	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota B a t a m 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	3	2.000.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24 Laporan	815.000	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota B a t a m 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	24	3.000.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		1 0 0 Persentase	15.964.702.915								100	18.308.720.697	Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		9 5 Orang/bulan	15.909.262.915	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	95	18.258.720.697	Dinas Perikanan
3	25	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	55.440.000	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	12	50.000.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.05		A d m i n i s t r a s i Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		1 0 0 Persentase	192.769.000								100	100.247.354	Dinas Perikanan
3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		95 Paket	70.129.000	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	0	100.247.354	Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional	Provinsi			Daerah			
3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	122.640.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	10	0	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100 Persentase	296.568.000							100	381.285.974	Dinas Perikanan	
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	3.640.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	1	2.699.025	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	142.943.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	5	158.263.925	Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	13.376.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	2	17.113.933	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	136.607.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	12	203.209.091	Dinas Perikanan
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100 Persentase	143.217.800								100	1.111.364.866	Dinas Perikanan
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		27 Unit	34.420.200	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	60	71.367.897	Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		11 Unit	108.797.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	37	239.996.969	Dinas Perikanan
3	25	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	1	800.000.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	0	0	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100 Persentase	160.100.000								100	255.717.061	Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	157.100.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	12	254.127.061	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	3.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	12	1.590.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100 Persentase	395.435.800								100	546.970.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	44.140.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	1	44.520.000	Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		14 Unit	250.742.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	15	243.800.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		71 Unit	50.030.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	50	55.650.000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	50.523.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota	1	203.000.000	Dinas Perikanan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Nelayan Kecil	26834,80	26306,05 Ton	8.868.926.384								26569,11	6.315.690.998	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan		6900 Rumah Tangga Perikanan (RTP)	8.868.926.384								6925	6.315.690.998	Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		0 Orang	101.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota dan Masyarakat	0	0	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya		100 Kelompok	106.826.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Kemiskinan	Pemerintah Kota dan Masyarakat	100	112.011.984	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		1000 Unit Usaha	1.430.847.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Kemiskinan	Pemerintah Kota dan Masyarakat	7000	1.576.209.803	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		304 Unit	7.230.251.984	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Kemiskinan	Pemerintah Kota dan Masyarakat	651	4.627.469.211	Dinas Perikanan
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan	10004,66	9807,53 Ton	2.773.687.000								9905,61	2.870.258.215	Dinas Perikanan
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang diberdayakan		100 Rumah Tangga Perikanan (RTP)	218.054.100								110	210.946.361	Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		23 Kelompok	47.474.100	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Kemiskinan	Pemerintah Kota dan Masyarakat	25	53.266.361	Dinas Perikanan
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		24 Kelompok	25.580.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Kemiskinan	Pemerintah Kota dan Masyarakat	10	54.000.000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahnya		500 Kelompok	145.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Kemiskinan	Pemerintah Kota dan Masyarakat	410	103.680.000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudi daya ikan yang memenuhi SOP		545 Rumah Tangga Perikanan (RTP)	2.555.632.900								560	2.659.311.854	Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		4 Dokumen	38.553.800	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota dan Masyarakat	4	59.400.000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		12 Dokumen	35.230.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota dan Masyarakat	12	45.351.382	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		133 Unit	2.481.849.100	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Kemiskinan	Pemerintah Kota dan Masyarakat	410	2.554.560.472	Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan dan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		0 Unit	0	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif		Pemerintah Kota dan Masyarakat	0	0	Dinas Perikanan
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolah Hasil Perikanan	1524,78	1 4 9 4 , 7 4 Ton	687.045.300							1509,69	1.460.719.745	Dinas Perikanan	
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala kecil dan mikro yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan		260 Unit Usaha	41.706.000							275	326.719.745	Dinas Perikanan	
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		50 Unit Usaha	41.706.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Kemiskinan	Pemerintah Kota dan Masyarakat	250	326.719.745	Dinas Perikanan
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan (ton)		46160,42 Ton	645.339.300							47182,12	1.134.000.000	Dinas Perikanan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		534 Ton	444.770.800	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Kemiskinan	Pemerintah Kota dan Masyarakat	1022	623.700.000	Dinas Perikanan
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		10 Pelaku Usaha	200.568.500	K o t a Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekono	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	-Kemiskinan	Pemerintah Kota dan Masyarakat	120	510.300.000	Dinas Perikanan
					TOTAL:					29.484.369.799		31.360.974.910							

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Pencapaian Program Prioritas Daerah dan Nasional

Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan nasional, Prioritas Nasional juga menjadi dasar bagi intervensi dalam aspek regulasi dan kelembagaan, perencanaan di masing-masing instansi pemerintah, serta pelaksanaan proyek strategis nasional. Konsep Asta Cita sebagai bagian dari Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Hubungan erat antara Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN 2025-2045 menciptakan sinergi kebijakan yang kokoh dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Program rencana kerja daerah disusun dengan menyelaraskan berbagai sasaran pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini memastikan agar setiap kegiatan saling mendukung secara penuh untuk mencapai tujuan nasional dan kebutuhan lokal. Berikut ini dukungan Program Dinas Perikanan Kota Batam terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Kota Batam.

Tabel 4.2 Dukungan Program Dinas Perikanan Kota Batam Terhadap Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Dukungan Program Tahun 2027	Pagu 2027	Perangkat Daerah Pengampu
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8.868.926.384	Dinas Perikanan
	2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.773.687.000	
	3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	687,045,300.00	

Tabel 4.3 Dukungan Program Dinas Perikanan Kota Batam Terhadap Prioritas Kota Batam

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator	Target Tahun 2027
Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan generasi yang unggul	Tingkat Kemiskinan	P1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	29. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	33 Jumlah Produksi Nelayan Kecil	9807,53
	Rasio Gini*		30. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	34 Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan	9807,53
Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat			31. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	35 Jumlah Produksi pengolah hasil perikanan	1494,74

Prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Sebagai bagian dari wilayah provinsi, Kota Batam perlu menyelaraskan arah dan fokus pembangunannya agar selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi. Oleh karena itu, keterkaitan antara prioritas pembangunan Kota Batam khususnya Dinas Perikanan dalam RKPD Tahun 2027 dengan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menjadi hal yang krusial untuk memastikan sinergi kebijakan, konsistensi perencanaan, serta efektivitas pencapaian tujuan pembangunan secara regional. Dukungan program Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2027 terhadap Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Dukungan Program Dinas Perikanan Kota Batam Terhadap Prioritas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2027	Dukungan Program RKPD Kota Batam Tahun 2027
(1)	(2)
Prioritas 1 Pengembangan Potensi Ekonomi, Maritim, dan Investasi yang	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Pengelolaan Perikanan Budi Daya. 3. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dinas Perikanan Kota Batam mendukung program pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui penguatan ekonomi nelayan, Program utama yang berjalan mencakup pembinaan nelayan kecil, bantuan sarana usaha nelayan, budidaya ikan dengan bioflok, serta kampanye gemar makan ikan.

Langkah nyata ini membantu mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir dan menjaga ketersediaan sumber daya ikan untuk masa depan. Melalui kerja sama yang baik dengan warga, sektor kelautan Batam bisa terus maju tanpa merusak alam sekitar. Dukungan program Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2027 terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Dukungan Program Dinas Perikanan Kota Batam Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

No	Tujuan/Program	Pagu Dana RKPD 2027
	(1)	(2)
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	7,495, 006,384

Dinas Perikanan Kota Batam mendukung pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sarana usaha bagi nelayan lokal. Dukungan nyata diwujudkan lewat pemberian bantuan sarana penangkapan ikan, pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUB), dan pendampingan teknis bagi masyarakat pesisir. Langkah strategis bertujuan untuk kemandirian ekonomi agar taraf hidup nelayan Batam semakin meningkat secara berkelanjutan. Dukungan program Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2027 terhadap Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Dukungan Program Dinas Perikanan Kota Batam Terhadap Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan

No.	Perangkat Daerah	Tujuan Program/Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Traget RKPD 2027	
								Kinerja	Pagu Renja
5	Dinas Perikanan								3.512.529.700
			3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					270.581.200
			3.25.03.2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				270.581.200
		Meningkatkan Pendapatan	3.25.03.2.02.0001			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	100	106.826.800
		Meningkatkan Pendapatan	3.25.03.2.02.0002			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Dengan Satuan:Kelompok)	100	106.826.800
		Meningkatkan Pendapatan	3.25.03.2.02.0003			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Dengan Satuan:Unit Usaha)	1000	56.927.600
			3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.554.903.200

No.	Perangkat Daerah	Tujuan Program/Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Traget RKPD 2027	
								Kinerja	Pagu Renja
			3.25.04.2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				73.054.100
			3.25.04.2.02.0001			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Dengan Satuan:Kelompok)	23	47.474.100
			3.25.04.2.02.0002			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Dengan Satuan:Kelompok)	24	25.580.000
			3.25.04.2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				2.481.849.100
			3.25.04.2.04.0009			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	133	2.481.849.100
			3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					687.045.300
			3.25.06.2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				41.706.000

No.	Perangkat Daerah	Tujuan Program/Strategi	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Traget RKPD 2027	
								Kinerja	Pagu Renja
			3.25.06.2.02.0002			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Dengan Satuan:Unit Usaha)	50	41.706.000
			3.25.06.2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				645.339.300
			3.25.06.2.03.0001			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Ton)	534	444.770.800
			3.25.06.2.03.0002			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	10	200.568.500

Dinas Perikanan Kota Batam mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan ketersediaan stok ikan yang aman dan mempromosikan konsumsi bagi anak-anak sekolah.

Dukungan nyata ini diwujudkan melalui kerja sama dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perikanan lokal guna menjaga kualitas dan kelancaran pasokan ikan segar yang higienis. Langkah tersebut tidak hanya membantu mencukupi kebutuhan gizi dan mencegah tengkes (stunting) pada anak, tetapi juga turut menggerakkan ekonomi para nelayan serta pelaku industri perikanan di Kota Batam. Dukungan program Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2027 terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Dukungan Program Dinas Perikanan Kota Batam Terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Pagu 2027	Urusan Pemerintahan Bidang
1.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				41.706.000	Kelautan dan Perikanan
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan			41.706.000	
			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	41.706.000	

BAB V Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2027 difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, menambah produksi perikanan, serta memperkuat daya saing produk kelautan. Target ini dicapai melalui penyediaan alat tangkap modern dan pelatihan budidaya.

Tabel 5.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Batam Tahun 2027 dan Akhir Tahun 2029

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027	Target Akhir 2029
1	Pendapatan rata rata nelayan kecil dan pembudidaya ikan dalam satu tahun.	(Rp)	47.696.647	61.661.485	76.407.360
1.1	Jumlah produksi perikanan	(ton)	37.511,21	36.113,58	37.207,86
1.2	Angka konsumsi ikan	(kg/orang/tahun)	40,60	33,53	33,66
1.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	(IKM)	91	92,50	93,50

5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan Kota Tahun 2027 difokuskan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, serta peningkatan konsumsi ikan masyarakat. Target utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5.2 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Batam Tahun 2027 dan Akhir Tahun 2029

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027	Target Akhir 2029
1	Jumlah produksi perikanan Tangkap	(ton)	26.366,37	26.306,05	27.103,15
2	Jumlah produksi perikanan Budidaya	(ton)	11.144,84	9.807,53	10.104,71

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perikanan merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam pada Tahun 2027 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggungjawab Dinas Perikanan Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

6.1 Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 dan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2027, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2027 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Rancangan Akhir Renja Dinas Perikanan Tahun 2027 terdiri dari 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Dokumen rancangan Akhir renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan daerah sebagaimana dasar perubahan RKPD Tahun 2027, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2027.

6.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam ranwal renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang di dalam Renstra Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025-2029 yang di dalam pelaksanaannya

harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja perangkat daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen di atasnya, diantaranya: RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota Batam, RPJMD Kota Batam, RKPD Kota Batam, dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, maupun yang bersumber dari APBN.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2027 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam, maka seluruh paratur Dinas Perikanan Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Ranwal Renja Tahun 2027.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermmanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Perikanan Kota Batam dalam pelayanan urusan kelautan dan perikanan.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD